

# PERMASALAHAN PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KARIR DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SE-KOTA YOGYAKARTA

## IMPLEMENTATION PROBLEMS ON CAREER GUIDANCE SERVICES IN THE STATE VOCATIONAL SCHOOL YOGYAKARTA

Oleh: Ratna Utami Singgih, Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta  
singgih2309@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dialami guru BK di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Subyek penelitian ini yaitu guru BK sejumlah 38 orang. Instrumen pengumpul data berupa angket. Uji validitas instrumen menggunakan validitas logis dengan *expert judgment*, sedangkan uji reliabilitas dengan *internal consistency* menggunakan rumus KR-20. Teknik analisis data menggunakan analisis data kuantitatif deskriptif dengan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dialami guru BK, (1) permasalahan aspek perencanaan sebesar 41,14% yaitu kesulitan membuat administrasi himpunan data hasil penilaian kebutuhan, (2) permasalahan tahap pengorganisasian sebesar 42,43% yaitu guru BK belum berpendidikan profesi konselor, (3) permasalahan tahap pelaksanaan sebesar 45,49% yaitu pelaksanaan program ceramah dari tokoh karir belum optimal, (4) permasalahan tahap evaluasi dan tindak lanjut sebesar 42,11% yaitu, kesulitan menyusun laporan pelaksanaan program bimbingan karir berdasar hasil evaluasi program layanan bimbingan karir.

Kata kunci: identifikasi permasalahan, layanan bimbingan karir.

### Abstract

*This study aims to identify the problems on career guidance implementation which have been faced by School Counselors at the State Vocational Schools in Yogyakarta. This is a survey research using descriptive quantitative approach. Thirty eight School Counselors were involved in this research and the data were collected with a questionnaire. The instrument was validated with logical validity and expert judgment and tested its reliability with internal consistency (formula KR-20). The data analysis was conducted with quantitative descriptive analysis. The results show that the problems on the implementation of career guidance services are (1) problem on planning is 41.14% denoted by the appearance of difficulty in making administrative data of need assessment, (2) the organizing problem is 42.43%. There are many School Counselors have not been acquired the professional certified counselor, (3) problem on implementing is 45,49% denoted by the implementation of career personage lecture program have not yet been optimal, (4) problem on evaluation and follow up is 42,11%, which consist of difficulty in making the report of implementating career guidance program according to the evaluation result of career guidance service program.*

*Keywords: problems, career guidance services.*

## PENDAHULUAN

Layanan BK mencakup empat bidang layanan yaitu bidang belajar, pribadi, sosial, dan karir. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 111 Tahun 2014

disebutkan bahwa tujuan khusus layanan adalah membantu konseli agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya; merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir dan kehidupannya di masa

yang akan datang (Permendikbud, 2014: 5). Sehingga siswa perlu mendapat bantuan dari guru BK berupa layanan bimbingan karir untuk memberikan informasi karir, menentukan pilihan karir dan mengambil keputusan karir yang sesuai dengan potensi siswa.

Pada penelitian ini peneliti berfokus kepada bimbingan karir. Menurut Syamsu Yusuf (2009: 12) bimbingan karir menurut merupakan sebuah upaya memberikan bantuan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya secara mendalam, mengenal dunia kerja dan mengembangkan masa depan yang sesuai dengan kehidupan yang diharapkannya. Bimbingan karir adalah aktivitas memberikan bantuan dalam perencanaan karir, pengambilan keputusan dan penyesuaian diri yang dilakukan oleh konselor di berbagai lingkup sehingga seseorang dapat mengembangkan karir di sepanjang usia bekerjanya (Robert L. Gibson & Marianne H. Mitchell, 2011: 446).

Lebih lanjut mengenai tujuan pemberian layanan bimbingan karir, Permendikbud RI Nomor 111 Tahun 2014 menyatakan bimbingan karir bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan, eksplorasi, aspirasi dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidup peserta didik/konseli (Permendikbud, 2014: 15). Adapun menurut Syamsu Yusuf (2009: 12) tujuan bimbingan karir yakni, agar individu mampu menentukan dan mengambil keputusan karirnya secara tepat lalu dapat bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya sehingga dapat mengaktualisasikan diri dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaan layanan bimbingan karir menjadi sangat penting

sebagai upaya membantu siswa memecahkan permasalahan karir yang dihadapinya

Namun dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir di lapangan masih terdapat hambatan. Berdasarkan observasi di SMKN 3 Yogyakarta dan SMKN 7 Yogyakarta, hasil menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir diantaranya masalah waktu, tidak adanya jadwal masuk kelas sehingga bimbingan klasikal sangat jarang dilaksanakan, rasio guru BK dengan siswa terlalu besar, terdapat guru BK yang bukan lulusan sarjana S1 program studi BK, sarana dan prasarana ruang BK belum ideal, serta kesadaran siswa mengikuti layanan bimbingan karir masih rendah. Permasalahan tersebut membuat pelaksanaan layanan bimbingan karir menjadi kurang optimal.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir di sekolah. Manfaat penelitian ini sebagai bahan masukan terkait pengambilan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan layanan bimbingan karir di sekolah, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja guru BK agar lebih optimal, dan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dialami oleh guru BK di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan program bimbingan karir di sekolah menurut Sukardi (1987: 235) meliputi

layanan informasi, ceramah dari tokoh karir, membuat peta dunia kerja, dan konseling karir. Sedangkan menurut Munandir (1996: 259-260) program bimbingan karir meliputi pemahaman dunia kerja, orientasi dunia kerja, konseling karir, penempatan, tindak lanjut dan evaluasi. Materi bimbingan karir merupakan salah satu yang mempengaruhi suksesnya layanan bimbingan karir. Menurut Anas Salahudin (2010: 118) materi layanan bimbingan karir mencakup informasi tentang dunia kerja, hubungan industrial, dan layanan perkembangan belajar yang masing-masing memiliki substansi. Substansi informasi dunia kerja meliputi lapangan kerja, jenis dan persyaratan jabatan, prospek dunia kerja, dan budaya kerja. Substansi hubungan industrial meliputi hubungan kerja sarana hubungan industrial, dan masalah khusus ketenagakerjaan. Substansi layanan perkembangan belajar meliputi kesulitan belajar, minat dan bakat, masalah sosial, masalah pribadi.

Pelaksanaan layanan bimbingan karir memerlukan media yang menarik agar materi yang disampaikan guru BK dapat diterima dengan baik oleh siswa. Aryadi Warsito dan Agus Triyanto (2010: 50-62) menjelaskan pengembangan media layanan bimbingan karir meliputi media grafis dan media elektronik. Media yang termasuk jenis media grafis diantaranya brosur, poster, dan modul. Sedangkan media yang termasuk jenis media elektronik yaitu rekaman video, rekaman audio, dan presentasi multimedia.

Pelaksanaan layanan bimbingan karir di sekolah agar dapat berjalan secara efektif dan

efisien memerlukan manajemen yang berkualitas. Hal tersebut diungkapkan oleh Achmad Juntika Nurihsan dan Akur Sudijanto (2005: 27) bahwa suatu program layanan tidak mungkin terlaksana bila tidak memiliki suatu sistem manajemen yang bermutu. Manajemen program layanan bimbingan karir terdiri dari: perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan program, pemanfaatan fasilitas, pengarahan dan evaluasi kegiatan.

Menurut Ridwan (2008: 54) penanganan efektif terhadap pelaksanaan layanan bimbingan karir di sekolah merupakan suatu proses mulai dari analisis kebutuhan, pembuatan rencana, pertimbangan program, dan evaluasi. Senada dengan pendapat di atas, menurut Prayitno (1997: 213) pelaksanaan program bimbingan karir meliputi proses perencanaan, persiapan pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan bimbingan karir di sekolah terdiri dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut.

Menurut Usman (2011: 65) perencanaan adalah serangkaian kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Merujuk dari pendapat tersebut, upaya mencapai tujuan layanan bimbingan karir dapat dilakukan dengan membuat perencanaan yang tepat dengan menyusun program layanan bimbingan karir yang akan dilaksanakan selama satu periode. Menurut Fathur Rahman (2008: 19) penyusunan program bimbingan karir pada dasarnya terdiri dari dua langkah besar, yaitu: 1)

pemetaan kebutuhan dan masalah atau *needassessment*; dan 2) merancang program yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah.

Program bimbingan yang telah disusun dengan baik, tidak akan terlaksana secara maksimal tanpa adanya penyiapan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Dewa Ketut Sukardi (1987: 256) sarana merupakan faktor yang sangat menentukan pelaksanaan layanan bimbingan karir di sekolah. Program bimbingan karir yang telah disusun tidak mungkin terlaksana dengan efektif tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Menurut Prayitno (1997: 215) prasarana pokok yang dibutuhkan yaitu ruangan beserta perabotannya (meja, kursi, lemari, rak, dsb), ruang BK sebaiknya diatur agar siswa yang datang merasa senang dan para personil pelaksana merasa betah atau nyaman bekerja di ruang tersebut. Idealnya ruang BK menurut Depdiknas (2007: 238) yakni, terdapat ruang kerja, ruang administrasi atau data, ruang konseling individual, ruang BK kelompok, ruang biblio terapi, ruang relaksasi, dan ruang tamu.

Organisasi layanan bimbingan karir di sekolah mengacu kepada organisasi BK di sekolah karena bimbingan karir merupakan salah satu bidang layanan BK. Menurut Sukardi (2008: 39-40) pengorganisasian berarti suatu bentuk kegiatan yang mengatur cara kerja, prosedur kerja, dan mekanisme kerja layanan bimbingan dan konseling.

Menurut Sukardi (1987: 235) setelah proses penyusunan program dan penyediaan kelengkapan bimbingan karir terjuwud, langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan program

bimbingan karir. Langkah ini pada intinya merupakan seperangkat kegiatan yang telah diprogramkan secara terpadu, menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan. Sukardi (1987: 235-236) menerangkan bahwa pelaksanaan program bimbingan karir di sekolah meliputi layanan informasi, ceramah dari tokoh karir, membuat peta dunia kerja, dan konseling. Munandir (1996: 259-260) menambahkan program bimbingan karir diantaranya yakni pemahaman dunia kerja, orientasi dunia kerja, konseling karir, penempatan, tindak lanjut dan evaluasi.

Sedangkan Suharsimi Arikunto (2011: 47) menjelaskan bahwa pelaksanaan layanan bimbingan karir harus didukung oleh tempat, waktu, dan materi yang sesuai. Metode yang digunakan oleh guru BK juga harus tepat. Menurut Dewa Ketut Sukardi (1987: 490) beberapa metode atau teknik yang dapat digunakan yakni, ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, sosiodrama, karyawisata, *career day*. Selain itu, Dewa Ketut Sukardi (2008: 113) memaparkan bahwa layanan bimbingan yang efektif tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa adanya kerjasama guru BK dengan pihak-pihak yang terkait, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Hal yang terakhir dilaksanakan yakni melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Menurut Sukardi (1987: 253) evaluasi dan tindak lanjut dalam bimbingan karir adalah seperangkat kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan bimbingan karir sehingga dapat mengatasi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan bimbingan karir. Tindak lanjut

merupakan kegiatan yang dilakukan setelah mengetahui hasil evaluasi atau penilaian. Hasil evaluasi menjadi umpan balik program yang memerlukan perbaikan, kebutuhan peserta didik yang belum terlayani, kemampuan personil dalam melaksanakan program, dan dampak program terhadap siswa (Sunaryo Kartadinata, 2007: 233).

Pada prakteknya ternyata layanan bimbingan karir di sekolah tidak dapat berjalan dengan mudah. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan bimbingan karir oleh guru BK. Permasalahan adalah hal yang menjadikan masalah; hal yang dipermasalahkan; atau persoalan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 719). Permasalahan dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir adalah segala hal yang menjadi masalah dan menghambat dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir.

Berdasarkan observasi dan wawancara serta kajian teori dapat diidentifikasi permasalahan layanan bimbingan karir di sekolah. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir dapat ditinjau dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan jenis penelitian survei.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016 di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta.

### **Subjek Penelitian**

Penentuan subyek dalam penelitian ini berdasarkan jumlah populasi yang ada. Menurut Suharsimi Arikunto (2005: 95) jika subyek kurang dari 100 orang maka lebih baik diambil semuanya dan penelitian tersebut termasuk penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah guru BK di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta sejumlah 38 orang.

### **Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen penelitian ini adalah angket permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir yang digunakan untuk mengungkap permasalahan yang dialami oleh guru BK dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir dari sudut pandang guru BK sebagai pelaksana utama layanan bimbingan karir.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Angket penelitian ini menggunakan jenis angket tertutup yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang (√) pada kolom atau tempat yang sesuai.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data penelitian ini yakni teknik analisis kuantitatif deskriptif. Hasil data kuantitatif dari jawaban angket dianalisis secara deskriptif dengan teknik presentase. Adapun langkah yang ditempuh dalam menggunakan teknik analisis data ini sebagai berikut:

1. Membuat tabel distribusi jawaban angket.
2. Menentukan skor jawaban responden sesuai skor yang telah ditetapkan.

3. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dialami guru BK pada setiap aspek, maka dihitung persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : persentase

f : jumlah frekuensi setiap aspek

N : jumlah subyek  $\times$  jumlah butir setiap aspek

Rumus persentase di atas untuk mengetahui tingkat permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dialami guru BK pada setiap aspek, dengan menghitung jumlah frekuensi setiap aspek atau (f), dibagi dengan jumlah subyek dikali jumlah item setiap aspek atau (N), maka diperoleh persentase.

4. Kemudian untuk mengetahui tingkat permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dialami guru BK pada setiap butir masalah, maka digunakan rumus:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : persentase

f : jumlah frekuensi setiap butir

N : jumlah subyek  $\times$  jumlah butir setiap aspek

Rumus persentase di atas untuk mengetahui tingkat permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dialami guru BK pada setiap butir masalah dengan menghitung jumlah frekuensi setiap butir (f), dibagi dengan jumlah subyek dikali jumlah butir setiap aspek (N), maka diperoleh persentase.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data hasil penelitian berdasarkan jawaban yang diperoleh dari guru BK di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta terhadap pernyataan yang tertuang dalam angket permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dialami guru BK berupa data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka yang merupakan skor dari jawaban angket. Data angka hasil perhitungan skor jawaban guru BK terhadap pernyataan dalam angket selanjutnya dihitung menggunakan rumus deskriptif persentase.

Tabel 1. Analisis Permasalahan Setiap Aspek Layanan Bimbingan Karir di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta.

No	ASPEK	(f)	(N)	Persentase
1	Perencanaan	469	1140	41,14%
2	Pengorganisasian	387	912	42,43%
3	Pelaksanaan	363	798	45,49%
4	Evaluasi dan tindak lanjut	128	304	42,11%
	Rata-rata	1347	3154	42,71%

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dialami guru BK di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta yang tertinggi terletak pada aspek pelaksanaan dengan persentase 45,49%. Sedangkan permasalahan terendah terletak pada aspek perencanaan dengan persentase 41,14%. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung rata-rata permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dialami guru BK di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta yakni sebesar 42,71%.

Permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dialami guru BK di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta yang tertinggi dalam setiap aspek sebagai berikut.

Tabel 2. Masalah Tertinggi pada Aspek Perencanaan

No	ASPEK	(f)	(N)	Persen-tase
1	Kesulitan membuat administrasi himpunan data hasil penilaian kebutuhan	25	469	5,33%
2	Kesulitan membuat rancangan anggaran dana untuk program Bimbingan Karir selama satu tahun pelajaran	25	469	5,33%
3	Ruang BK belum memiliki ruang bk kelompok untuk bimbingan kelompok masalah karir	23	469	4,9%

Permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dialami guru BK di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta tertinggi pada aspek perencanaan yakni: kesulitan membuat administrasi himpunan data hasil evaluasi kebutuhan, kesulitan membuat rancangan anggaran dana untuk program Bimbingan Karir selama satu tahun pelajaran, ruang BK belum memiliki ruang BK kelompok untuk bimbingan kelompok masalah karir.

Menurut Munandir (1996: 249-250) rencana program yang baik adalah yang berdasarkan pada kebutuhan siswa, guru BK dapat mengetahui kebutuhan dan masalah karir siswa dengan berbagai cara seperti pengamatan, wawancara, studi dokumen, dan kuisioner. Oleh karena itu masalah dalam aspek perencanaan dengan indikator masalah *need assessment* (evaluasi kebutuhan) yakni kesulitan membuat administrasi himpunan data hasil evaluasi kebutuhan dapat mengambat pelaksanaan layanan bimbingan karir. Masalah tersebut dapat terjadi karena guru BK belum terbiasa mengadministrasikan data tentang evaluasi kebutuhan karir siswa dengan sistematis.

Permasalahan pada aspek perencanaan dengan indikator menyusun rencana program tahunan dan semesteran yakni kesulitan membuat rancangan anggaran dana untuk program bimbingan karir selama satu tahun

pelajaran dapat mengurangi keberhasilan pelaksanaan layanan bimbingan karir. Menurut Sukardi (1987: 222) bahwa penyusunan rencana program tahunan atau semesteran layanan bimbingan karir di sekolah memegang peranan yang penting dalam keberhasilan pelaksanaan bimbingan karir di sekolah. Masalah tersebut dapat muncul karena dalam membuat rancangan anggaran dana bimbingsn karir untuk satu tahun dibutuhkan pemahaman manajemen keuangan yang baik.

Selanjutnya idealnya ruang BK menurut Depdiknas (2007: 238) yakni, terdapat ruang kerja, ruang administrasi atau data, ruang konseling individual, ruang BK kelompok, ruang biblio terapi, ruang relaksasi, dan ruang tamu. Permasalahan pada aspek perencanaan dengan indikator prasarana yakni ruang BK belum memiliki ruang BK kelompok untuk bimbingan kelompok masalah karir dapat membuat siswa-siswa yang mendapatkan layanan bimbingan kelompok masalah karir merasa kurang nyaman. Masalah tersebut masih banyak dijumpai di beberapa sekolah karena belum adanya kebijakan dari sekolah untuk membangun ruang BK yang lebih representatif dan ideal untuk pelaksanaan layanan bimbingan karir.

Tabel 3. Masalah Tertinggi pada Aspek Pengorganisasian

No	Butir Masalah	(f)	(N)	Persen-tase(%)
1	Rasio guru BK dengan siswa terlalu tinggi	23	387	5,94%
2	Guru BK belum berpendidikan profesi konselor	23	387	5,94%
3	Kesulitan melaksanakan layanan Bimbingan Karir di lapangan sesuai dengan teori yang ada	22	387	5,68%

Permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dialami guru BK di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta tertinggi pada aspek pengorganisasian yakni: rasio guru BK dengan siswa terlalu tinggi, guru BK belum berpendidikan profesi konselor, kesulitan melaksanakan layanan Bimbingan Karir di lapangan sesuai dengan teori yang ada.

Menurut Prayitno (1997: 215) tenaga utama dalam pelayanan bimbingan karir adalah guru BK. Rasio seorang guru BK dan siswa SMK yaitu 1 : 150, artinya seorang guru BK memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan pelayanan BK kepada 150 siswa. Pelaksanaan layanan bimbingan karir terhadap siswa kurang optimal jika rasio guru BK dengan siswa terlalu tinggi sebab kontrol guru BK terhadap siswa asuhnya akan melemah sehingga kurang dapat memahami kebutuhan permasalahan karir siswa dan membantu menyelesaikannya.

Selanjutnya permasalahan dengan indikator kualifikasi akademik yakni guru BK belum berpendidikan profesi konselor, dari 38 guru BK di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta belum ada yang mengambil pendidikan profesi konselor. Selain itu terdapat 11 orang guru BK di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta yang berlatar belakang pendidikan non-BK. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 menyatakan bahwa kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan berpendidikan profesi konselor. Masalah kualifikasi akademik guru BK yang belum sesuai dengan peraturan

yang berlaku terjadi karena kurangnya rekrutmen guru BK baru yang berasal dari sarjana S1 BK, sekolah memanfaatkan waktu guru mata pelajaran yang kekurangan jam mengajar untuk menjadi guru BK.

Selain itu, permasalahan yang muncul dari aspek pengorganisasian dengan indikator kondisi personil BK yakni guru BK kesulitan melaksanakan layanan bimbingan karir di lapangan sesuai dengan teori yang ada. Permasalahan tersebut merujuk kepada standar kompetensi guru BK yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 yakni kompetensi inti guru BK atau konselor dirumuskan menjadi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Permasalahan tersebut muncul karena guru BK kurang memperbarui keilmuan yang dimilikinya, hal ini ditinjau dari tidak pernah mengikuti pelatihan, seminar atau *workshop* khusus tentang layanan bimbingan karir disekolah.

Tabel 4. Masalah Tertinggi pada Aspek Pelaksanaan

No	Butir Masalah	Skor (f)	Skor Maks (N)	Persen-tase (%)
1	Pelaksanaan program ceramah dari tokoh karir belum optimal	23	363	6,34%
2	Tidak terdapat jadwal masuk kelas khusus BK	26	363	7,16%
3	Belum dapat menggunakan metode karyawisata karir	23	363	6,34%

Permasalahan yang muncul dari aspek pelaksanaan dengan indikator pelaksanaan program layanan dasar yakni program ceramah dari tokoh karir belum optimal. Masalah tersebut termasuk dalam pelaksanaan program layanan



informasi karir. Menurut Sukardi (1987: 236) layanan informasi dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir memegang peranan yang penting, dengan layanan informasi akan secara langsung bisa membantu siswa untuk memahami dirinya dalam kaitannya dengan dunia kerja, pendidikan, dan masalah kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, masalah pelaksanaan program layanan informasi karir berupa program ceramah dari tokoh karir yang belum optimal dapat menghambat siswa untuk memperoleh informasi karir yang bermanfaat untuk dirinya dan masa depannya. Masalah tersebut muncul jika guru BK kurang mempunyai jaringan dengan tokoh-tokoh yang sukses membangun karir mereka sehingga kesulitan untuk melakukan lobi terhadap para tokoh karir.

Selain itu, permasalahan yang muncul dari indikator metode yang digunakan dalam layanan bimbingan karir, yakni belum dapat menggunakan metode karya wisata karir. Menurut Sukardi (1987: 522) metode karya wisata karir menekankan suatu kegiatan dimana siswa pergi ke luar kelas untuk mengunjungi situasi pekerjaan tertentu. Tujuan metode karyawisata dalam bimbingan karir adalah agar para siswa mengetahui, memahami, atau menghayati situasi pekerjaan sebagaimana adanya, siswa melakukan sendiri yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu metode ini sangat bermanfaat agar siswa dapat memiliki pemahaman yang konkrit tentang jenis pekerjaan tertentu. Permasalahan guru BK belum dapat menggunakan metode karya wisata karir muncul disebabkan kegiatan ini memerlukan dana yang cukup banyak dan perencanaan yang

matang agar tidak hanya terjadi piknik yang tidak menambah ilmu.

Tabel 5. Masalah Tertinggi pada Aspek Evaluasi dan Tindak Lanjut

No	Butir Masalah	Skor (f)	Skor Max	Persentase
1	Kesulitan menilai partisipasi dan aktivitas siswa dalam kegiatan Bimbingan Karir	20	128	15,6%
2	Kesulitan mengungkap minat siswa terhadap perlunya layanan Bimbingan Karir lebih lanjut	19	128	14,8%
3	Kesulitan menyusun laporan pelaksanaan program (lapelprog) Bimbingan Karir berdasar hasil evaluasi program layanan Bimbingan Karir	21	128	16,4%

Permasalahan yang muncul dari aspek evaluasi dan tindak lanjut dengan indikator evaluasi yakni kesulitan menilai partisipasi dan aktivitas siswa dalam kegiatan Bimbingan Karir, kesulitan mengungkap minat siswa terhadap perlunya layanan Bimbingan Karir lebih lanjut. Menurut Ahmad Juntika Nurihsan dan Akur Sudianto (2005: 46) evaluasi dalam bimbingan karir dapat dilakukan dengan cara mengamati partisipasi dan aktivitas siswa dalam kegiatan bimbingan karir, mengungkap pemahaman siswa tentang materi bimbingan karir yang disampaikan, mengungkap minat siswa terhadap perlunya layanan bimbingan karir lebih lanjut, mengungkap kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan kegiatan bimbingan karir. Permasalahan tersebut terjadi karena guru BK belum terbiasa melaksanakan evaluasi proses bimbingan karir.

Selanjutnya, permasalahan yang muncul dari aspek evaluasi dan tindak lanjut dengan indikator laporan yakni kesulitan menyusun laporan pelaksanaan program (lapelprog) Bimbingan Karir berdasar hasil evaluasi program layanan Bimbingan Karir. Menurut Kemdikbud (2013: 21) laporan pelaksanaan program (lapelprog) disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban dari tugas guru BK dan sebagai bukti keterlaksanaan program. Permasalahan tersebut terjadi karena dalam proses pelaksanaan bimbingan karir administrasi dokumen kurang rapi sehingga saat akan menyusun laporan kesulitan mengumpulkan data-data saat program dilaksanakan.

Permasalahan dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dialami guru BK di SMK negeri se-Kota Yogyakarta tertinggi yakni aspek pelaksanaan, sedangkan permasalahan terendah yakni aspek perencanaan. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena secara kuantitas guru BK belum memenuhi jumlah ideal rasio guru BK dengan siswa 1: 150, sehingga perencanaan yang sudah disusun baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan. Hal tersebut senada dengan Wijono dalam (Istiqomah, 2016: 6) seringkali diketahui perencanaan dan pengorganisasian sudah bagus, namun dikarenakan kurangnya kemampuan pelaksanaan dan minim jumlah sumber daya yang ada, hasil kegiatan suatu pekerjaan belum seperti yang diharapkan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dialami guru BK di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir pada aspek perencanaan sebesar 41,14%. Hasil tersebut di dukung oleh tiga butir

masalah yang memiliki permasalahan tertinggi, yaitu:

- a. Kesulitan membuat administrasi himpunan data hasil evaluasi kebutuhan dengan persentase 5,33%.
- b. Masalah guru BK kesulitan membuat rancangan anggaran dana untuk program bimbingan karir selama satu tahun pelajaran dengan persentase 5,33%.
- c. Ruang BK belum memiliki ruang BK kelompok untuk bimbingan kelompok masalah karir dengan persentase 4,9%.

2. Permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir pada aspek pengorganisasian sebesar 42,43%. Hasil tersebut di dukung oleh tiga butir masalah yang memiliki permasalahan tertinggi, yaitu:

- a. Masalah rasio guru BK dengan siswa terlalu tinggi dengan persentase 5,94%.
- b. Masalah guru BK belum berpendidikan profesi konselor dengan persentase 5,94%.
- c. Masalah guru BK kesulitan melaksanakan layanan bimbingan karir di lapangan sesuai dengan teori yang ada dengan persentase 5,68%.

3. Permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir pada aspek pelaksanaan sebesar 45,49%. Hasil tersebut di dukung oleh tiga butir masalah yang memiliki permasalahan tertinggi, yaitu:

- a. Masalah tidak terdapat jadwal masuk kelas khusus BK dengan persentase 7,16%.
- b. Pelaksanaan program ceramah dari tokoh karir belum optimal dengan persentase 6,34%.

- c. Belum dapat menggunakan metode karyawisata karir dengan persentase 6,34%.
4. Permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir pada aspek evaluasi dan tindak lanjut sebesar 42,11%. Hasil tersebut di dukung oleh tiga butir masalah yang memiliki permasalahan tertinggi, yaitu:
- Kesulitan menyusun laporan pelaksanaan program (lapelprog) Bimbingan Karir berdasar hasil evaluasi program layanan Bimbingan Karir dengan persentase 16,4%.
  - Kesulitan menilai partisipasi dan aktivitas siswa dalam kegiatan Bimbingan Karir dengan persentase 15,6%.
  - Kesulitan mengungkap minat siswa terhadap perlunya layanan Bimbingan Karir lebih lanjut dengan persentase 14,8%.
- Saran**
- Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:
- Bagi Kepala Sekolah
    - Menyediakan prasarana (ruang BK) untuk layanan bimbingan karir yang memadai dan sesuai standar.
    - Menambah guru BK (honorar) baru dari sarjana S-1 BK.
    - Menugaskan kepada guru BK untuk mengikuti pendidikan dan latihan (diklat), seminar, workshop yang berkaitan dengan:
  - Bagi Guru BK
    - Guru BK hendaknya membaca, memahami buku panduan dalam melaksanakan *need assessment* (penilaian kebutuhan) dengan diskusi antar guru BK dan segera mengolah data yang telah diperoleh.
    - Guru BK hendaknya lebih aktif melakukan koordinasi dengan bendahara dan kepala sekolah terkait anggaran dana bimbingan karir.
    - Guru BK hendaknya lebih kreatif untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok karir di ruang terbuka/ *outdoor* dengan tetap menjaga asas-asas BK.
    - Guru BK hendaknya berupaya meningkatkan kualifikasi akademik dengan mengikuti pendidikan profesi konselor.
    - Guru BK hendaknya lebih aktif dan antusias mengikuti pendidikan dan latihan (diklat), seminar, workshop terkait implementasi teori bimbingan karir dalam prakteknya.
    - Guru BK hendaknya lebih kreatif menggunakan media layanan bimbingan karir seperti *bookleat*, *leafleat*, sebagai pengganti jam masuk kelas.
    - Guru BK hendaknya memperluas jaringan dan kerjasama dengan tokoh-tokoh karir.
    - Guru BK hendaknya melakukan koordinasi dan kerjasama program karyawisata karir dengan kegiatan kesiswaan seperti *study tour*.
    - Guru BK hendaknya membaca, memahami buku panduan penyusunan laporan

program bimbingan karir, dan segera menyusun laporan setelah kegiatan selesai.

- j. Guru BK hendaknya aktif mengikuti MGBK, melakukan diskusi antar guru BK terkait penilaian dan tindak lanjut layanan bimbingan karir.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya endaknya dapat melakukan penelitian pengembangan terkait permasalahan pelaksanaan bimbingan karir yang dialami guru BK, agar diperoleh penelitian yang lebih spesifik, sehingga dapat mengurangi permasalahan pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dialami guru BK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Juntika Nurihsan dan Akur Sudianto. 2005. *Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMA Kurikulum 2004*. Jakarta: Grasindo.
- Aryadi Warsito dan Agus Triyanto. 2010. *Pengembangan Media Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Kementerian Pendidikan Nasional UNY Prodi BK.
- Depdiknas. 2008. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
- Dewa Ketut Sukardi dan Desak Nila Kusmawati. 2008. *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewa Ketut Sukardi. 1987. *Bimbingan karir di sekolah-sekolah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Istiqomah. 2016. *Fungsi Pelaksanaan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: UNM
- Munandir. 1996. *Program Bimbingan Karir di Sekolah*. Jakarta: Dept P dan K Dirjen Dikti Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Prayitno, dkk. 1997. *Bulu IV Pelayanan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- Ridwan. 2008. *Penanganan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Robert L. Gibson dan Marianne H. Mitchell. 2011. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ruslan A. Gani. 1996. *Bimbingan Karir*. Bandung: Angkasa.
- Sugiyono. 2014. *Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto. 2011. *Penilaian dan penelitian Bidang Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan. 2009. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Usman, Husaini. 2011. *Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.